

IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Achmad Farhan

NPP. 30.0440

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Program Studi Keuangan Publik

Email: 8achmadfarhan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Mulyadi, S.P., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): One of the purposes of local finance is the distribution of budget in the field of Education to improve the quality of Education in a region. In the government of Bandar Lampung City, the budget is allocated to the Department of Education and Culture of Bandar Lampung City as the implementing agency in the field of Education. In the management of local finance, there is often misappropriation or deviation in the implementation of local finance management, which can harm the local finance and the people, such as corruption of budget funds from the Regional Budget (APBD). Therefore, in the preparation and management of the APBD, there are several principles that must be applied to make local finance management clean and towards good governance. Among these principles, transparency and accountability are the most important. Therefore, transparency and accountability principles are necessary to be implemented in the management of APBD. **Purpose:** The objective of this study is to determine the implementation of transparency and accountability principles in the financial management of the Department of Education and Culture of Bandar Lampung City, identify the inhibiting factors faced by the Department of Education and Culture of Bandar Lampung City in financial management implementation, and examine the efforts made by the Department of Education and Culture of Bandar Lampung City to overcome these obstacles. **Method:** The researcher conducted qualitative research based on Creswell's translated qualitative research method, which relies on textual and visual data, has unique steps in data analysis, and draws from different research strategies. Primary and secondary data were obtained through data collection techniques such as interviews and literature review, which were analyzed using descriptive qualitative method. **Result:** In recent years, there have been several cases of misappropriation of APBD funds in Bandar Lampung City. Therefore, transparency and accountability principles are necessary to be implemented in the management of APBD. **Conclusion:** The author concludes that the implementation of transparency is carried out by involving all components of the school, and through this involvement, schools can convey their needs that need to be fulfilled. The school committee, as a representative of the community and parents, also has the opportunity to express ideas and suggestions that can directly contribute to the progress of the school. On the accountability side, regarding the use of BOS funds, it can be seen from the reports submitted by the school to the central department quarterly, and these reports are also provided to the parties that require the financial reports, including the school committee. **Keywords:** Tranparency, Acountability, Financial Management.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu kegunaan dari keuangan daerah adalah pendistribusian anggaran di bidang Pendidikan agar dapat meningkatkan mutu Pendidikan di suatu daerah. Pada pemerintah Kota Bandar Lampung, anggaran tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai OPD yang bergerak di bidang Pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dapat merugikan keuangan daerah dan juga rakyat, seperti korupsi dana anggaran dari APBD. Untuk itu dalam penyusunan dan pengelolaan APBD terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan untuk dapat menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan menuju pemerintahan yang good governance. Diantara prinsip tersebut yang terpenting adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Penelitian kualitatif menurut Creswell yang sudah diterjemahkan, penelitian dengan metode kualitatif adalah dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. **Hasil/Temuan:** Dalam beberapa tahun terakhir di kota bandar lampung terjadi beberapa kasus penyelewengan dana APBD. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk diterapkan dalam pengelolaan APBD. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dilakukan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, dengan keterlibatan ini sekolah dapat menyampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Komite sekolah sebagai pihak yang mewakili suara masyarakat dan walimurid juga mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan ide gagasan yang dapat secara langsung membantu kemajuan sekolah. Lalu dari sisi akuntabilitas pada penggunaan dana BOS, dapat terlihat dari laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pusat percaturwulan dan laporan tersebut juga dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan dana tersebut, salah satunya komite sekolah. **Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera adalah amanat UUD 1945. Pemerintah harus menjalankan segala kegiatan pemerintahan dengan baik dan bersih agar dipercaya oleh masyarakat. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Karenanya untuk mewujudkan good governance pada tahun 2008, disahkanlah undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 2019: 3).

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah menurut (Mahmudi, 2009:17) adalah “tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel”.

Dalam proses pembiayaan pendidikan tidak hanya membicarakan atau membahas tentang analisa berbagai sumber dananya saja tetapi pembiayaan pendidikan juga terdapat penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien berbagai sistem pendidikan, dapat menyebabkan biaya yang akan dibutuhkan semakin berkurang sehingga apa saja yang menjadi tujuan yang diinginkan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Efektifitas pendidikan menjelaskan tingkat kesesuaian yang terdapat dalam jumlah pengeluaran diperoleh dengan jumlah yang ditargetkan. Sehingga masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menciptakan serta memperoleh pendidikan yang sudah ditentukan. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan (Budi Budaya, 2017).

Setiap pembiayaan pendidikan baik yang berbasis umum maupun madrasah membutuhkan data yang akurat dan lengkap agar setiap kebutuhan yang diperlukan dapat diantisipasi dalam bentuk rancangan anggaran. Berbagai macam biaya pendidikan yang dipergunakan harus dikelola dan dicatat dengan sebaik mungkin, sehingga biaya pendidikan dapat menyeimbangkan atau memenuhi berbagai proses pembelajaran serta berbagai program yang ada di sekolah. Pembiayaan pendidikan yang dikelola dan digunakan dengan baik maka dapat mengoptimalkan berbagai layanan pendidikan pada para konsumennya baik konsumen internal maupun eksternal (Mulyasa, 2005:29).

Dalam pembiayaan pendidikan salah satu jenis yang terdapat di dalamnya yaitu pembiayaan yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan bantuan anggaran dana yang cukup besar dalam bidang pendidikan yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh sebab itu dalam bidang pendidikan memperoleh kucuran anggaran dana yang sangat cukup dalam membiayai berbagai macam aktivitas yang ada dalam pendidikan. Anggaran pendidikan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN agar berbagai macam kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Untuk mengalokasikan dana yang ada dalam bidang pendidikan, maka pemerintah memberikan perhatiannya pada bidang pendidikan sebagai bidang yang sangat penting dalam membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke setiap sekolah. Program BOS merupakan penerapan atau implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Reguler. Dalam Peraturan menteri ini yang

dimaksud adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya pendidikan adalah salah satu komponen masukan instrument (instrumental input) yang memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan disekolah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan agar dapat menunjang dalam menyediakan sarana dan prasarana agar belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif serta dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik (Mulyasa, 2016;35). Setiap dana BOS yang diberikan pemerintah kepada setiap sekolah maka akan dikelola secara langsung oleh setiap sekolah yang menerimanya yang sering disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah merupakan penyerasian dan pengkoordinasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis atau mandiri oleh setiap sekolah yang menerimanya melalui sejumlah input manajemen agar tujuan sekolah dapat tercapai dalam rangka pendidikan nasional dan mengikut sertakan semua kelompok kepentingan yang berkaitan dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan dana BOS dapat dimanfaatkan serta digunakan secara maksimal jika menggunakan manajemen yang baik. Setiap dana BOS yang masuk dipergunakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dalam buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah.

Dalam pemenuhan kebutuhan sekolah penggunaan dana BOS, dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan, tentunya keterlaksanaan program sekolah harus menghasilkan peserta didik yang berkualitas serta memiliki berbagai macam prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Banyak faktor pendukung yang terdapat di dalam lingkup internal sekolah yang sangat menentukan keberhasilan program sekolah, baik dari faktor pendukung kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, sampai keseluruhan fasilitas pendukung sekolah (Eka Prihatin, 2011;22).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dilingkungan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang diteliti oleh Maysarah menyebutkan bahwa Dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah terutama dalam pembiayaan Operasional Sekolah. 3 hal yang ukur yakni perencanaan, implementasi, dan evaluasi dana BOS sudah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Hanya saja dana yang diterima oleh sekolah sering mengalami keterlambatan dalam pencairannya yang berasal dari pusat sehingga menyebabkan tertundanya penyaluran dana BOS yang diperuntukkan untuk berbagai hal yang dibutuhkan oleh sekolah.

Masalah lain yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana BOS yang dialami dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yaitu dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sering mengalami keterlambatan sehingga dalam pencairannya pun juga mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan kurangnya penjelasan terkait manajemen pembiayaan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Segala bentuk pembiayaan dana BOS digunakan sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta pencatatan dana BOS sudah dicatat dengan sebaik mungkin menggunakan aplikasi baru yang harus terus dilakukan penyesuaian dalam penggunaannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dari sisi manajemen pembiayaan maupun akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Penelitian oleh (Jumianti 2018) yang berjudul “*Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah di Bandar Lampung*” menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Sekolah di Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan adanya keterlibatan seluruh oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Kajian penelitian Fierda Shaftratunnisa menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada stakeholders sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai Yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). Kajian penelitian Wulan Asih menemukan bahwa pengelolaan keuangan SDN 014746 Kwala Sikasim sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen BOS, komite sekolah dan seluruh guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2019. Penerapan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS di SDN 014746 Kwala Sikasim sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019, pertanggungjawaban dana BOS dilakukan setiap triwulan, tetapi transparansinya belum berjalan dengan baik ditunjukkan dengan tidak adanya pemasangan pada papan informasi mengenai realisasi penggunaan dana BOS (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). Kajian Lailia menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan cukup baik, yaitu adanya RKA-SKPD sebagai perencanaan dana BOS, kesesuaian penggunaan dana dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah dan pemerintah secara terbuka. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis penggunaan dana BOS (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). Dan kajian yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar menemukan bahwa MTs. Muhammadiyah syuhada termasuk dalam kategori tinggi dalam melaksanakan kebijakan transparan dan akuntabel (Univeristas Muhammadiyah Makassar, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengkaji dan menjelaskan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terutama Bantuan Operasional Sekolah di kota Bandar Lampung, metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Pengukuran/ indikator yang digunakan berdeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edah Jubaedah (Edah Jubaedah, dkk, 2008) yang berpendapat bahwa indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* yaitu ketersediaan payung hukum, kemudian ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik, ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik, dan

kecepatan serta kemudahan mendapatkan informasi publik. Kemudian indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip akuntabilitas menurut Edah Jubaedah adalah akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, pertanggungjawaban kinerja, intensitas penyimpangan, upaya tindak lanjut penyimpangan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitaitaf menurut Creswell yang sudah diterjemahkan, penelitian dengan metode kualitatif adalah dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda (Cresswell John. W.,)

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Bendahara, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Program dan Informasi, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Adapun analisisnya menggunakan teori Transparansi dan Akuntabilitas yang digagas oleh Edah Jubaedah (Edah Jubaedah, dkk, 2008) yang menyatakan bahwa indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* yaitu ketersediaan payung hukum, kemudian ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik, ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik, dan kecepatan serta kemudahan mendapatkan informasi publik. Kemudian indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip akuntabilitas menurut Edah Jubaedah adalah akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, pertanggungjawaban kinerja, intensitas penyimpangan, upaya tindak lanjut penyimpangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana implementasi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pendapat dari edah Jubaedah. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Pengelolaan Keuangan

Hasil temuan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung terkait dengan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS yaitu dimana pelaksanaannya dilakukan pada saat tahap penyusunan atau proses perencanaan dana BOS. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2020 yang membahas tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang mana menjelaskan pada pasal 3 ayat (5) yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS dan dapat mengkoordinir semua aspirasi dari pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Hal ini dimaksudkan supaya bahwa setiap pengelolaan yang dilakukan sekolah dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat berjalan secara terbuka, baik terbuka dalam mekanisme dan terbuka dalam menerima setiap aspirasi dan masukan dari para masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan di sekolah.

Penerapan transparansi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada saat penyusunan dana BOS. Dana BOS yang diterima oleh sekolah meliputi banyaknya siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Mekanisme penerapan transparansi dilakukan dengan sekolah menyiapkan data kebutuhan operasional yang harus dipenuhi oleh sekolah selama satu tahun ajaran, data tersebut sudah mencakup semua kebutuhan baik sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, penggajian guru tidak tetap, dan pembiayaan lainnya. Perencanaan tersebut disusun sehingga membentuk sebuah rencana kegiatan yang bisa disebut Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Seperti yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu Ekowati (2016:77) bahwa RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja yang harus dikeluarkan oleh sekolah guna kepentingan operasional selama satu tahun.

Transparansi yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, diungsikan sebagai salah satu upaya agar masyarakat paham bagaimana sekolah mengelola pendidikan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan sekolah. RKAS menjadi salah satu perencanaan guna melihat apa saja kepentingan yang bersifat mendesak yang dimiliki sekolah. RKAS di buat dengan berpedoman dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Menurut penuturan dari kepala sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan sekolah sudah ada dalam EDS yang dibentuk sebuah kurva kebutuhan dan kepentingan sekolah yang mana dari kurva tersebut sekolah dapat memutuskan kebutuhan sekolah yang mendesak. Hal tersebut didukung penjelasan dari Laila (2018: 89) yang juga mengatakan bahwa perencanaan Anggaran dan kegiatan yang dibuat oleh sekolah digunakan untuk kegiatan dan program yang berkaitan dengan siswa serta operasional sekolah.

Biaya pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang dialokasikan pada setiap satuan lembaga pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada sekolah untuk menunjang jalannya proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Dalam pengelolaan dana BOS sekolah diwajibkan untuk mengelola sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya dengan mengangkat prinsip akuntabilitas sebaik mungkin kepada masyarakat atau stakeholder. Penyusunan perencanaan terhadap dana BOS yang berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dimulai dengan melakukan proses penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Perencanaan yang dibuat oleh sekolah ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah dalam periode satu tahun ajaran. Semua komponen sekolah dilibatkan tidak terkecuali guru dan komite sekolah. Dalam penyusunan sendiri, guru yang dikutsertakan sudah terbagi menjadi beberapa koordinator antara lain, koordinator keuangan, koordinator umum, sarana dan prasarana, kurikulum dan kesiswaan. Koordinator ini yang akan menyampaikan setiap kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi prioritas utama sekolah, baik dalam bentuk kebutuhan yang harus di beli maupun yang harus diperbaiki.

Dalam proses penyusunan RKAS bukan hanya kebutuhan - kebutuhan sekolah yang harus diperhatikan, semua komponen sekolah yang tergabung dalam proses penyusunan RKAS juga harus merencanakan kegiatan ataupun program sekolah yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun, dan nantinya program tersebut juga berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan. Selain dari tim koordinator guru dan staff kependidikan juga terdapat peran penting dari kepala sekolah, pejabat pelaksanaan teknik kegiatan (PPTK), bendahara dan komite sekolah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Laila (2018: 72) yang menjelaskan bagaimana peran penting Kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS, karena

sifatnya sebagai penanggungjawab utama maka kepala sekolah harus mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS mulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan proses pelaporan.

3.2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Berbicara mengenai pelaporan atau akuntabilitas sekolah sebagai penerima dan pengelola dana BOS. Menurut temuan penelitian dan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan proses pelaporan hasil pengelolaan dana BOS yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang dituju seperti halnya pemerintah, masyarakat. Pelaporan dana BOS sendiri dilakukan melalui dua cara yakni Offline dan Online. Pelaporan secara Offline ditunjukkan dengan sekolah yang bertanggungjawab membagikan data hasil pengelolaan dana BOS kepada masyarakat atau stakeholder, pelaporan secara offline ini dilakukan oleh sekolah pada saat pelaksanaan rapat antara masyarakat dengan sekolah. Selain itu, pelaporan secara offline juga ditunjukkan sekolah dengan adanya papan anggaran yang berisi besaran dana yang dikeluarkan oleh sekolah selama proses operasional sekolah. Pelaporan yang dilakukan sekolah secara online dilakukan dengan melibatkan komite sekolah sebagai perantara data yang akan diberikan kepada masyarakat. data hasil pengelolaan tersebut disalurkan komite sekolah kepada para walimuri melalui grup yang memang telah disediakan oleh komite sekolah sebagai wadah informasi terkait pengelolaan sekolah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Transparansi yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diungsikan sebagai salah satu upaya agar masyarakat paham bagaimana sekolah mengelola pendidikan sebagik mungkin sesuai dengan kebutuhan sekolah. RKAS menjadi salah satu perencanaan guna melihat apa saja kepentingan yang bersifat mendesak yang dimiliki sekolah. RKAS di buat dengan berpedoman dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Menurut penuturan dari kepala sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan sekolah sudah ada dalam EDS yang dibentuk sebuah kurva kebutuhan dan kepentingan sekolah yang mana dari kurva tersebut sekolah dappat memutuskan kebutuhan sekolah yang mendesak. Hal tersebut didukung penjelasan dari Laila (2018: 89) yang juga mengatakan bahwa perencanaan Anggaran dan kegiatan yang dibuat oleh sekolah digunakan untuk kegiatan dan program yang berkaitan dengan siswa serta operasional sekolah. Dalam proses penyusunan RKAS bukan hanya kebutuhan - kebutuhan sekolah yang harus diperhatikan, semua komponen sekolah yang tergabung dalam proses penyusunan RKAS juga harus merencanakan kegiatan ataupun program sekolah yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun, dan nantinya program tersebut juga berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan. Selain dari tim koordinator guru dan staff kependidikan juga terdapat peran penting dari kepala sekolah, pejabat pelaksanaan teknik kegiatan (PPTK), bendahara dan komite sekolah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Laila (2018: 72) yang menjelaskan bagaimana peran penting Kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS, karena sifatnya sebagai penanggungjawab utama maka kepala sekolah harus mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS mulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan proses pelaporan.

Berbicara mengenai pelaporan atau akuntabilitas sekolah sebagai penerima dan pengelola dana BOS. Menurut temuan penelitian dan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan proses pelaporan hasil pengelolaan dana BOS yang dilaporkan kepada

pihak-pihak yang dituju seperti halnya pemerintah, masyarakat. Pelaporan dana BOS sendiri dilakukan melalui dua cara yakni Offline dan Online. Pelaporan secara Offline ditunjukkan dengan sekolah yang bertanggungjawab membagikan data hasil pengelolaan dana BOS kepada masyarakat atau stakeholder, pelaporan secara offline ini dilakukan oleh sekolah pada saat pelaksanaan rapat antara masyarakat dengan sekolah. Selain itu, pelaporan secara offline juga ditunjukkan sekolah dengan adanya papan anggaran yang berisi besaran dana yang dikeluarkan oleh sekolah selama proses operasional sekolah. Pelaporan yang dilakukan sekolah secara online dilakukan dengan melibatkan komite sekolah sebagai perantara data yang akan diberikan kepada masyarakat. data hasil pengelolaan tersebut disalurkan komite sekolah kepada para walimuri melalui grup yang memang telah disediakan oleh komite sekolah sebagai wadah informasi terkait pengelolaan sekolah. Menurut dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Pelaporan yang ditunjukkan bukan hanya untuk pemberi anggaran, namun juga disalurkan kepada pihak yang menerima anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan pendidikan memang menjadi salah satu yang penting. Keterlibatan dalam setiap program dan kegiatan sekolah menjadi alasan sekolah dapat dikategorikan menjadi sekolah terbuka. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung terkait dengan dampak dari adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana BOS di sekolah. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menjadi sekolah yang terbuka. Terbuka dalam hal ini yakni, masyarakat dalam hal ini mampu mengutarakan kebutuhan dan program-program yang dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Memberikan kesempatan untuk masyarakat ikut serta dalam kegiatan dan memberikan akses untuk masyarakat menerima informasi yang berkaitan dengan sekolah akan membuat masyarakat merasa juga memiliki pengelolaan sekolah tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Suzuki (2012) yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasinya, seperti berkontribusi untuk pengembangan sekolah, berkontribusi pada kesejahteraan guru dan ikut dalam kegiatan sekolah.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yakni kurangnya inovasi dan kreativitas dari para pelaksana pengelola keuangan, sehingga penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS bisa berjalan lebih efektif dan efisien terutama melalui media yang digunakan oleh sekolah dalam menginformasikan data kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dilakukan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, dengan keterlibatan ini sekolah dapat menyampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Komite sekolah sebagai pihak yang mewakili suara masyarakat dan walimurid juga mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan ide gagasan yang dapat secara langsung membantu kemajuan sekolah.

Kemudian dari sisi akuntabilitas pada penggunaan dana BOS, dapat terlihat dari laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pusat pencatatan dan laporan tersebut juga dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan dana tersebut, salah satunya komite sekolah. Pelaporan yang dilaporkan kepada pihak masyarakat melalui komite sekolah yang mana sebagai jembatan antara pihak sekolah dan masyarakat. Pelaporan kepada masyarakat dilakukan sekolah secara offline yakni pada saat adanya pertemuan dengan walimurid. Bentuk akuntabilitas yang di berikan sekolah terhadap

masyarakat berupa laporan LPJ. Dampak yang dihasilkan dari adanya Transparansi dan Akuntabilitas dana BOS ini sekolah lebih bisa membuka diri untuk ide-ide yang berasal dari masyarakat. Walimurid dapat mengutarakan ide-ide dan walimurid juga dapat paham bagaimana pengelolaan sekolah khususnya pengelolaan keuangannya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menciptakan jiwa kepedulian masyarakat terhadap semua kegiatan sekolah menjadi meningkat, contohnya dengan masyarakat selalu ingin diikutsertakan dalam semua kegiatan sekolah sebagai bentuk partisipasinya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asih Wulan, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sdn 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara” Medan: 2021
- Budi Budaya, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif,” Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 18, no. 1 (2017): 42–59.
- Creswell, John W. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Edah Jubaedah dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*, (Bandung: PKP2AI LAN, 2008), hal. 57-58
- Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Fierda Shaftratunnisa (2018) “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir” Bandar Lampung :2018
- Jumianti, (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Lailia, “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang” Malang: 2018
- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016). 1
- Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005).